

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 418-422
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14555212>

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan

Marsyela¹, Marsyeli², Tasya Widyana³, Dita Oktaviani⁴, Tengku Darmansah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: marsyela03@gmail.com, marsyeli332@gmail.com, tasyawidyana@gmail.com, odita6050@gmail.com, tengkudarmansah@uinsu.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan yang telah diterapkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui studi literatur dari berbagai referensi jurnal dan buku secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang terfokus pada peningkatan kompetensi guru berdampak positif pada kualitas pembelajaran. Selain itu, dalam artikel ini menjelaskan makna kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, serta strategi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan Pendidikan, Mutu Lembaga Pendidikan*

Abstract

Education is the main pillar in creating quality human resources. Education policy has a strategic role in ensuring the achievement of optimal educational goals. However, the implementation of these policies often faces various challenges, especially in improving the quality of educational institutions in schools. This research aims to evaluate educational policies that have been implemented to improve the quality of education in schools. The method used is a qualitative approach with data analysis through in-depth study of literature from various journal and book references. The research results show that education policies that focus on increasing teacher competency have a positive impact on the quality of learning. Apart from that, this article explains the meaning of education policy, the quality of education, the objectives of evaluating education policy, as well as strategies for improving the quality of education. Therefore, synergy is needed between the government, schools and society to improve the overall quality of education.

Keywords: *Evaluation, Education Policy, Quality of Educational Institutions*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 15 December 2024

Accepted date: 23 December 2024

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan masih menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mempengaruhi perkembangan individu, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, terdapat kebutuhan mendesak akan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia sebagai salah satu bidang prioritas telah diatur melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti pemerataan akses terhadap pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Namun tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan seringkali menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan, salah satu tantangan terbesar di sektor pendidikan adalah kesenjangan antara kebijakan yang dikembangkan di tingkat pusat dan implementasi di tingkat daerah. Seringkali, strategi hebat di atas kertas belum tentu menghasilkan perubahan nyata dalam

kenyataan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya keselarasan dengan kebutuhan spesifik lembaga.

Akibatnya, sulit mencapai pemerataan mutu pendidikan yang diharapkan di seluruh daerah. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan yang ada. Dengan melakukan evaluasi, Anda tidak hanya dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kualitas pendidikan, namun juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif dan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan, berdasarkan kebutuhan actual. Kajian ini fokus pada evaluasi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, khususnya dalam rangka upaya peningkatan mutu lembaga Pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan menilai dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan di masa depan. Mengingat rumitnya permasalahan pendidikan di Indonesia, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, studi ini mewakili sebuah langkah penting menuju pengembangan kebijakan yang tidak hanya relevan dan dapat diterapkan, namun juga mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan di institusi pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat non-numerik, seperti kata-kata, gambar, atau perilaku, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau pengalaman manusia. Pendekatan deskriptif kualitatif yang kami gunakan untuk mengkaji tentang evaluasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Data-data yang diteliti berupa buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan judul penelitian kami yang berjudul evaluasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Penulis mengumpulkan dan menganalisis tema yang terkait yaitu berupa data-data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, dan artikel jurnal yang membahas mengenai judul yang akan kami bahas, lalu menganalisa dari apa yang sudah di kumpulkan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

KAJIAN TEORI

Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan pendidikan tertentu mematuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki dampak yang diinginkan pada audiens target. Proses evaluasi ini dilakukan melalui penerapan analisis kebijakan, dalam rangka menentukan kemandirian kebijakan pendidikan dan potensinya untuk keberhasilan implementasi. Dengan mengevaluasi kebijakan pendidikan, seseorang dapat mengidentifikasi keterbatasan dan kelebihanannya dalam praktiknya.

Kegiatan evaluasi mewakili puncak dari proses pembuatan kebijakan, menawarkan wawasan berharga untuk lebih menyempurnakan kebijakan pendidikan. Biasanya, evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses berurutan yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan tersebut (Winarno, 2008). Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi kebijakan pendidikan belum tentu merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, karena juga dapat dilakukan selama tahap analisis, terutama ketika kebijakan gagal memenuhi harapan yang diinginkan atau gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk memastikan penilaian kebijakan pendidikan yang komprehensif, menjadi penting untuk menyajikan banyak pembenaran logis. Ini termasuk: a) membedakan kelayakan penerapan kebijakan yang dirancang selama perumusannya, b) mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dirumuskan, c) menetapkan korelasi antara pro dan kontra perumusan kebijakan dengan faktor kontekstual dan tidak langsung yang mempengaruhi pengambilan keputusan, d) menentukan sejauh mana formulasi kebijakan pendidikan telah diterapkan secara efektif, e) memastikan kemanjuran dan ketidakpastian seputar kebijakan pendidikan, f) menganalisis dampak sosial dari pendidikan kebijakan pada masyarakat umum, g) menangani kecukupan strategi mitigasi risiko yang diterapkan selama perumusan kebijakan, dan h) menguraikan langkah-langkah untuk peningkatan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang koheren dari pertimbangan ini dan mengevaluasi kebijakan pendidikan secara efektif, sangat penting untuk mendorong koordinasi dan komunikasi yang intensif di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat Penilaian kebijakan pendidikan mencakup berbagai aktor. Pertama, ada aktor formal yang memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan memastikan implementasinya. Aktor-aktor ini termasuk pembuat kebijakan, seperti legislator, serta pelaksana kebijakan dan administrator di berbagai tingkat pemerintahan. Mereka bertindak sebagai kekuatan pendorong di balik inisiatif pendidikan. Kedua, ada aktor non-formal yang juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pendidikan. Aktor-aktor ini terdiri dari administrator dan anggota partai-parpol, yang membawa perspektif dan prioritas mereka sendiri ke meja. Selain itu, organisasi waktu, kelompok kepentingan, dan kelompok perantara semuanya berkontribusi pada wacana seputar kebijakan pendidikan.

Selain itu, mitra pelaksana kebijakan, tokoh individu, media massa, dan lembaga yang terlibat dalam organisasi pendidikan semuanya memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan. Misalnya, di Indonesia, ada organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan yayasan pendidikan yang aktif berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bersama-sama, aktor-aktor yang beragam ini bekerja secara kolaboratif untuk membentuk kebijakan pendidikan dan memastikan implementasinya yang efektif.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan di negara atau daerah tertentu. Menurut Slameto (2010), kebijakan pendidikan harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang bersifat holistik, meliputi kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, dan manajemen sekolah.

Mutu Lembaga Pendidikan di Sekolah

Ridwan, dkk (2015:3) menunjukkan sifat yang menggambarkan mutu sebagai “baiknya” suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga dengan kriteria tertentu. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa mutu merupakan sebagai satuan yang dapat digunakan bersama-sama sebagai konsep yang absolut dan relatif. Sallis dalam Ridwan (2015) menyebut konsep sebagai sesuatu yang bersifat mutlak (absolute). Mutu sama halnya sifat baik, cantik, dan benar yang merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisinya absolut merupakan sesuatu yang bermutu dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat dapat diungguli (Edward, 2011:51). Sedangkan konsep mutu yang relative memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau layanan, akan tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Dengan demikian, konsep mutu merupakan tingkat atau derajat tentang baik buruknya barang dan jasa yang diproduksi baik itu bersifat Absolut maupun relatif.

Edward (2011:6), Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Pihak-pihak stakeholder terdiri dari pihak internal dan eksternal. Stakeholder pendidikan internal meliputi: peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi: calon peserta didik, orang tua, pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat umum dan masyarakat khusus (dunia usaha dan dunia industri).

Dalam orientasi mutu pendidikan dalam upaya memenuhi atau memuaskan kebutuhan stakeholders, perlu diperhatikan bahwa manajemen mutu sekolah bukanlah seperangkat peraturan yang kaku melainkan seperangkat, hakikat, prosedur, dan proses untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sekolah. Oleh sebab itu manajemen mutu sekolah dapat dinyatakan sebagai cara

dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah, dengan mengarahkan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya dengan melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan penuh semangat dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan lulusan atau jasa pendidikan yang berkualitas atau bahkan melebihi standar stakeholders. Salah satu faktor yang mempengaruhi lulusan yang berkualitas adalah mutu pengajaran yang dilaksanakan oleh guru di sekolah.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Iskandar (2015) menyatakan bahwa pentingnya pendekatan berbasis hasil dalam evaluasi kebijakan pendidikan di sekolah, yang melibatkan aspek pengembangan kompetensi guru, pembaruan kurikulum, serta peningkatan fasilitas pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar.

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Mutu pendidikan mencakup berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, sarana dan prasarana, kurikulum, serta pengelolaan lembaga yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan kompetensi pendidik.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar Pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Hadis dan Nurhayati (2010:3) menjelaskan dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, di antaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan jurnal ini, dibahas bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan dapat membantu meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah kebijakan pendidikan yang diterapkan berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak yang positif. Dalam praktiknya, evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan kebijakan yang ada.

Evaluasi kebijakan pendidikan bukan hanya langkah terakhir dalam proses kebijakan, tetapi juga bisa dilakukan di tengah jalan untuk memastikan kebijakan tersebut masih relevan dan bisa diperbaiki jika ada masalah. Misalnya, evaluasi ini membantu melihat apakah kebijakan yang telah dirancang bisa diterapkan dengan baik, apakah hasilnya sesuai dengan tujuan, atau apakah masih ada kendala yang perlu diatasi.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran di sekolah. Kebijakan pendidikan yang baik harus mencakup aspek kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan manajemen sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Dalam proses ini, semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, perlu bekerja sama.

Secara sederhana, evaluasi kebijakan pendidikan membantu memahami apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana memastikan kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

SIMPULAN

Jurnal ini mengkaji evaluasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan di sekolah. Pendidikan yang berkualitas dipandang sebagai pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dengan kebijakan pendidikan memegang peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, implementasi kebijakan sering kali menemui tantangan, seperti kurangnya koordinasi, sumber daya yang terbatas, dan kesenjangan antara kebijakan pusat dan daerah.

Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru berdampak positif terhadap kualitas

pembelajaran. Selain itu, evaluasi kebijakan membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam implementasi, memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, aspek seperti kurikulum, fasilitas pendidikan, teknologi, serta profesionalisme tenaga pendidik menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan pendidikan. Jurnal ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, pendekatan berbasis hasil, dan pengelolaan sumber daya secara profesional.

REFERENSI

- Gunawan, Ade, dkk. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. Riau: ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
- Ridwan, Isda, dan Anies. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sallis, Edward. 2011. *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Siahaan, Amiruddin, dkk. (2023). *Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Medan: Journal on Education
- Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Premindo.